



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHN FERIAN TO
2. Jabatan : ASISTEN KASN
3. NHK : 741182

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1290 m²/64 m² di KAB / KOTA LEBONG, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 15540 m² di KAB / KOTA LEBONG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 17000 m² di KAB / KOTA CURUP, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 11293 m² di KAB / KOTA CURUP, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/154 m² di KAB / KOTA CURUP, WARISAN Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 301.000.000

1. MOBIL, MITSUBHISI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 140.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.791.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.791.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.